

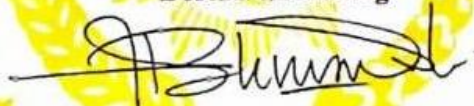
**NASKAH PUBLIKASI**

**KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU 2019 DI  
KABUPATEN KULON PROGO**

Oleh:  
**DEVI SYAHFITRI**  
20160520112

Telah disetujui dan disahkan sebagai naskah publikasi sesuai kaidah  
penulisan karya ilmiah

Dosen Pembimbing



**Dr. Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.**  
NIK: 19741227200004 163 067

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Ilmu Sosial  
dan Ilmu Politik**

**Dr. Fitri Purwaningsih, S.IP., M.Si**  
NIK: 19690822199603 163 038



**Ketua Program Studi  
Ilmu Pemerintahan**

**Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si**  
NIK: 19660828199403 163 025

# KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILU TAHUN 2019 DI KABUPATEN KULON PROGO

## SINOPSIS

Keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting karena setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah mewakili kepentingan semua pihak. Sementara itu sampai saat ini mayoritas kursi parlemen diduduki oleh kaum laki-laki, padahal pemerintah secara sah melegitimasi kuota perempuan sebesar 30%. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo karena di kabupaten Kulon Progo terjadi kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dari pileg 2014 ke pileg 2019, selain itu hal yang menarik lainnya ialah ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo selama dua periode berturut-turut adalah seorang perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan, apa saja faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, dan mengapa terjadi kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih khususnya pada pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo.

Kegiatan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan unit analisa caleg perempuan pertahana terpilih dan pengurus partai Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia, caleg tidak terpilih dan pengurus Partai Golongan Karya, caleg perempuan pertahana tidak terpilih dan pengurus Partai Nasional Demokrasi. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data penelitian dianalisis melalui 4 tahapan menurut Miles dan Huberman (1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data.

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil yaitu keterwakilan perempuan dapat dilihat dari 3 tahapan yaitu tahapan pencalegan, tahapan perolehan suara dan tahapan perolehan kursi. Pada pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo setiap partai hanya mampu memenuhi kuota sebesar 30% pada tahap pecalegan saja, Terdapat 9 faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan yaitu faktor pendukung meliputi dukungan keluarga, kecakapan bersosialisasi, dukungan partai politik dan solidaritas tim sukses. Sedangkan faktor penghambat meliputi persaingan dengan *incumbent*, minimnya pendidikan politik, sistem pemilu proporsional terbuka, keterbatasan biaya dan waktu dan terjadinya kenaikan keterpilihan perempuan sebesar 2,5 % pada pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo karena adanya motivasi, komitmen partai, dan eksistensi PDIP. kampanye dan sosialisasi.

Kesimpulan dari penelitian ini ialah meskipun pada tahapan perolehan suara dan perolehan kursi tidak mampu mencapai kuota 30% namun terjadi kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih. Untuk meningkatkan keterwakilan perempuan harus adanya komitmen yang kuat baik itu dari partai maupun dari caleg perempuan itu sendiri.

**Kata Kunci:** Keterwakilan Perempuan dalam Politik, Pemilu, Partai Politik

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang artinya kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Sebagai negara demokrasi maka tidak heran apabila Indonesia selalu dikaitan dengan pelaksanaan pesta demokrasi melalui pemilihan umum. Bahkan Sibarani 2009 mengatakan bahwa “tidak ada demokrasi tanpa pemilu”. Pemilu menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal (1) ayat (1) ialah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari definisi tersebut maka bangsa Indonesia mengakui bahwa pentingnya dilaksanakan pemilu di Indonesia. Melalui pemilu maka terbukalah kesempatan yang seluas-luasnya bagi Warga Negara Indonesia untuk ikut bersaing memperebutkan kursi kekuasaan mewakili kepentingan rakyat.

Saat ini di Indonesia, mayoritas kursi di parlemen diduduki oleh kaum laki-laki, sementara perempuan sangat minim, padahal pemerintah secara jelas menegaskan melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 6 yang berbunyi “Daftar calon wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap dapil”. Keterwakilan perempuan dalam politik sangat penting karena setiap keputusan dan kebijakan publik

haruslah diambil dengan merepresentasikan kepentingan semua pihak. Sementara apabila mayoritas kursi parlemen diduduki oleh laki-laki, maka keputusan dan kebijakan yang diambil cenderung melalui perspektif laki-laki tanpa memperhatikan kepentingan perempuan.

Kabupaten Kulon Progo memiliki 12 Kecamatan. Pada pemilu 17 April 2019 terdapat 404 Daftar Calon Tetap (DCT) yang akan bersaing memperebutkan 40 kursi di 5 dapil di Kabupaten Kulon Progo. Dari 404 calon tersebut terdapat 226 DCT laki-laki dan 178 DCT perempuan. Dari seluruh dapil tersebut didapatkan persentase keterwakilan laki-laki sebesar 56%, sementara perempuan 44%. Tabel DCT dibawah ini menunjukkan bahwa setiap partai memenuhi kuota perempuan sebesar 30%, namun dari 40 total kursi yang diperebutkan tersebut hanya ada 8 perempuan yang terpilih, sementara sisanya dimenangkan oleh caleg laki-laki. Delapan orang caleg perempuan tersebut hanya setara dengan 20% dan 38 orang caleg laki-laki tersebut setara dengan 80%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang sangat jauh antara keterwakilan perempuan dan laki-laki di Kabupaten Kulon Progo dalam pemilu 2019.

**Tabel 1. Perbandingan Persentase Data Calon Tetap (DCT) Laki-Laki dan Perempuan Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo**

No	Partai Politik	Laki-Laki	Persentase	Perempuan	Persentase	Jumlah
1	Partai Amanat Nasional	22	56%	17	44%	39
2	Partai Berkarya	9	42%	12	58%	21

3	Partai Bulan Bintang	10	55%	8	45%	18
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	22	56%	17	44%	39
5	Partai Demokrat	17	58%	12	42%	29
6	Partai Gerakan Indonesia Raya	25	63%	15	37%	40
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	1	25%	3	75%	4
8	Partai Golongan Karya	22	55%	18	45%	40
9	Partai Hati Nurani Rakyat	9	50%	9	50%	18
10	Partai Keadilan Sejahtera	23	58%	16	42%	39
11	Partai Kebangkitan Bangsa	24	61%	15	39%	39
12	Partai Nasdem	17	51%	16	49%	33
13	Partai Persatuan Pembangunan	13	59%	9	41%	22
14	Partai solidaritas Indonesia	2	50%	2	50%	4
15	Partai Persatuan Indonesia	10	55%	8	45%	18
	Total	226	56%	178	44%	404

Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo

**Tabel 2. Perbandingan Persentase Caleg Perempuan Terpilih di Kabupaten Kulon Progo Pada Pileg Tahun 2014-2019 dan Pileg Tahun 2019-2024 (40 Kursi)**

No	Keterangan	PILEG 2014-2019	PILEG 2019-2024
1.	Jumlah Perempuan Terpilih	7 Kursi	8 Kursi
2.	Persentase	17,5 %	20%

Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa perbandingan persentase perempuan dan laki-laki menunjukkan ketimpangan yang sangat besar, bahkan representasi caleg laki-laki yang terpilih disetiap dapil berkisar antara 63% sampai dengan 100%, sementara

representasi caleg perempuan yang terpilih hanya berkisar 0% sampai dengan 37%, hanya ada 1 dapil yang memenuhi kuota sebesar 30% yaitu Dapil Kulon Progo 2. Menurut data tersebut terjadi kenaikan keterwakilan perempuan sebesar 2,5%. Jumlah caleg

perempuan terpilih pada Pileg tahun 2014-2019 ialah sebanyak 7 orang, sedangkan caleg perempuan terpilih pada Pileg tahun 2019-2024 ialah

sebanyak 8 orang. Selain itu, dari total 8 orang caleg perempuan yang terpilih 4 diantaranya merupakan petahana.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas subjek yang diteliti pada penelitian ini difokuskan pada 3 partai yaitu Partai Demokrasi Perjuangan Indoneia selaku partai yang mendominasi kursi perempuan dalam pileg 2019 di Kabupaten Kulon Progo, partai golongan karya selaku partai pengusung caleg perempuan terbanyak yaitu 18 orang namun tidak ada satupun caleg perempuannya yang terpilih, dan partai yang terakhir ialah Partai Nasional Demokrasi karena satu-satunya caleg petahana perempuan yang mencalonkan diri kembali dan tidak terpilih berasal dari partai Nasdem. maka penelitian difokuskan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan, faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan, dan mengapa terjadi kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo karena di Kabupaten Kulon Progo terjadi kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dari pileg 2014 ke pileg 2019, selain itu hal yang menarik lainnya ialah ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo secara dua periode berturut-turut adalah seorang perempuan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

Berikut jurnal yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terkait dengan representasi perempuan diberbagai

daerah di Indonesia yang digunakan untuk mendukung penelitian penulis serta menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu.

Penelitian oleh yang ditulis oleh (Ardiansa, 2015) dalam analisisnya melalui Pusat Kajian Politik DIP FISIP – Universitas Indonesia menyebutkan bahwa analisis keterwakilan perempuan dapat dilihat dari 3 tahapan analisis, yaitu *Pertama*, tahapan pecalegan yang menghadirkan keterwakilan perempuan secara kuantitas dengan adanya kuota sebesar 30% bagi perempuan. *Kedua*, perolehan suara perempuan. *Ketiga*, perolehan kursi bagi perempuan. Hasil Pemilu 2014 menunjukkan hasil yang stagnan, keterwakilan perempuan dianggap tidak menjadi lebih baik. Analisis terhadap hasil akhir persentase keterwakilan perempuan pada Pemilu 2009 dan 2014 bisa ditelaah melalui tiga tahapan, yaitu tahap pencalonan sebesar 33% dan 37%, tahap perolehan suara mencapai 22% dan 23%, dan tahap perolehan kursi yaitu 18% dan 17%.

Jurnal yang ditulis oleh (Bhakti, 2016) menyebutkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tulungagung dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu, faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat meliputi krisis kepercayaan masyarakat terhadap wakil perempuan, rendahnya pendidikan politik, ketersediaan dana

penunjang karir di politik. Faktor pendukung meliputi dukungan dari keluarga, kecakapan bersosialisasi, dan dukungan dari partai politik.

Penelitian yang dilakukan oleh (Sutrisno, 2016) Representasi perempuan di Aceh dapat dilihat dari siapa dan dari kelompok mana calon berasal. Pada pemilu 2014-2019 terdapat 12 orang perempuan di parlemen Aceh yang dapat memberikan harapan baru bagi masyarakat Aceh.

Jurnal yang ditulis oleh (Nurchahyo, 2016) menjelaskan bahwa adanya budaya patriarki seolah membatasi hak perempuan dalam bidang politik, padahal saat ini peran perempuan sangat dibutuhkan khususnya untuk menciptakan keteraturan gender.

Jurnal yang ditulis oleh (Malik, 2016) yang menjelaskan bahwa Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengeluarkan surat keputusan sebagai respon dari kebijakan afirmatif yang didalamnya tertuang ketetapan pemberian hak kuota sekurang-kurangnya 30% kepada para kandidat perempuan yang ingin bersaing dalam pemilu.

Seminar Nasional yang disampaikan oleh (Djou, 2018) menjelaskan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini masih jelas terjadi keberpihakan partai politik dan kesetaraan gender, bahkan dalam Pilkada serentak tahun 2018. Data KPU menyebutkan hanya ada 10 kandidat perempuan dari 1.145 kandidat yang terdaftar.

Tulisan yang ditulis oleh (Nengsih, 2019) yang menurut pendapatnya kuota 30% yang dihadirkan pemerintah hanya

merupakan awal dari jalan untuk mencapai partisipasi perempuan yang aktif dalam perpolitikan Indonesia. Karena pada dasarnya jumlah perempuan yang bertambah dalam parlemen melalui kuota 30% tadi tetap tidak akan mampu menyaingi suara laki-laki yang masih menempati persentase yang lebih tinggi. Sehingga, ketika masih ada ketidaksetaraan bagi perempuan dalam pendudukan jabatan strategis dalam politik, kuota ini hanya akan sia-sia karena tidak memiliki legitimasi.

Dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan dalam pemilu dirasa semakin dibutuhkan. Politisi perempuan mempunyai peran dan kedudukan yang sama dengan politisi laki-laki. Namun sepanjang pemilu demokratis tahun 2004 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan bahwa kuota sebesar 30% yang diberikan kepada kaum perempuan melalui peraturan peraturan yang ada tidak pernah terpenuhi. Penelitian ini juga dilakukan untuk mendukung dan memperkuat penelitian sebelumnya khususnya penelitian yang dilakukan oleh Dirga, 2015 yang juga melihat keterwakilan perempuan dalam pemilu dalam 3 tahapan yaitu pencalegan, perolehan suara dan perolehan kursi, namun kelemahan dalam penelitiannya tidak secara spesifik membahas faktor apa saja yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu. Berbeda dengan penelitian penelitian sebelumnya, penelitian ini difokuskan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi

keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019, khususnya di Kabupaten Kulon Progo dengan melihat permasalahan dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang caleg perempuan, baik itu caleg perempuan yang terpilih maupun caleg perempuan yang tidak terpilih. Selanjutnya, dilihat pula dari sudut pandang pengurus partai, baik itu pengurus partai yang partainya mendapatkan kursi maupun tidak mendapatkan kursi. Teori konsep yang digunakan dalam penelitian ini ada 5 yaitu :

- a) **Keterwakilan Dalam Politik,** harus menghadirkan perwakilan dari setiap golongan, jenis kelamin, ras maupun suku untuk menciptakan keadilan khususnya negara dengan sistem demokrasi keterwakilan seperti Indonesia.
- b) **Keterwakilan Perempuan Dalam Politik,** Perempuan merupakan elemen penting dalam terciptanya keadilan, demokrasi keadilan, sehingga keterwakilannya mampu menjembatani aspirasi kaumnya dengan pemerintah.
- c) **Gender,** saat ini gender tidak lagi diartikan sebagai jenis kelamin laki-laki atau perempuan namun lebih kepada pengaruh konstruksi nilai-nilai sosial dan budaya yang melahirkan interaksi didalam masyarakat itu sendiri.
- d) **Pemilu,** Pemilu atau sering dikenal juga dengan

sebutan pesta demokrasi merupakan suatu kompetisi besar dan bergengsi dalam menarik hati rakyat guna mendapatkan kepercayaan rakyat untuk menduduki kursi pemerintahan.

- e) **Partai Politik,** Partai politik merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama sehingga membentuk suatu organisasi yang disebut dengan partai, yang secara bersama sama melakukan aktivitas politik untuk mencapai tujuannya.

### 3. METODE PENELITIAN

Kegiatan penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif, dengan unit analisa caleg perempuan pertahana terpilih dan pengurus partai Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia selaku partai yang mendominasi kursi perempuan dalam pileg 2019 di Kabupaten Kulon Progo, caleg tidak terpilih dan pengurus Partai Golongan Karya selaku partai pengusung caleg perempuan terbanyak yaitu 18 orang namun tidak ada satupun caleg perempuannya yang terpilih caleg perempuan pertahana tidak terpilih dan pengurus Partai Nasional Demokrasi (Nasdem) karena satu satunya caleg pertahana yang mencalonkan diri kembali dan tidak terpilih berasal dari partai Nasdem. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara dan dokumentasi. Jenis data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data penelitian dianalisis melalui 4 tahapan menurut Miles dan Huberman (1992)

yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi

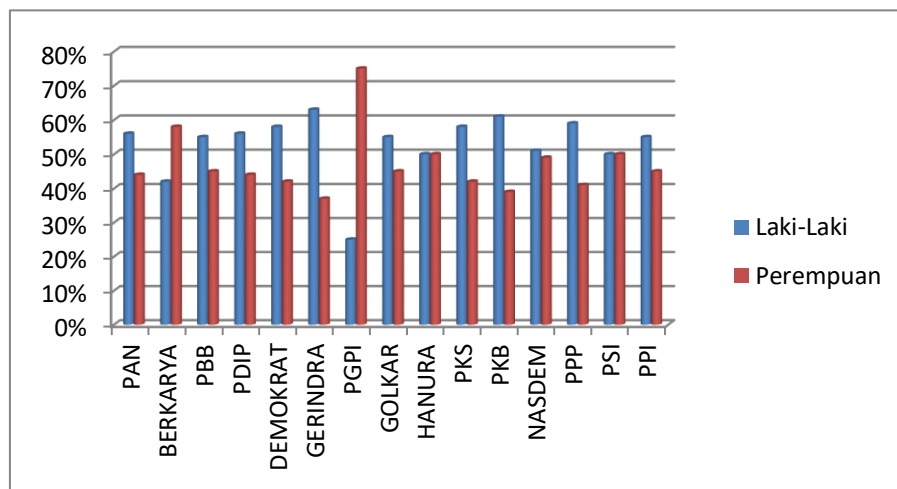
data.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Keterwakilan Perempuan Dalam Pemilu 2019 Di Kabupaten Kulon Progo

##### 1) Keterwakilan Perempuan Saat Pencalegan

**Gambar 1. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu Legislatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019**



**Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo**

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa pada tahap pecalegan setiap partai yang bersaing dalam pemilu legislatif 2019-2024 memenuhi kuota perempuan sebesar 30%. Dalam proses rekrutmen caleg, beberapa partai mampu mengusung caleg perempuan yang mempunyai kualitas intelektual yang baik, mengerti azas politik sehingga mampu memperjuangkan hak hak rakyat khususnya hak

perempuan. Tidak hanya dalam pecalegan namun dalam struktur kepengurusan partaipun, beberapa partai berusaha memenuhi kuota 30% perempuan didalamnya dengan tujuan melibatkan partisipasi kaum perempuan khususnya dalam mencapai tujuan bersama dalam partai (hasil wawancara dengan Ketua DPC PDIP Kulon Progo, Sudarto).

Namun tidak semua partai mampu mengusung

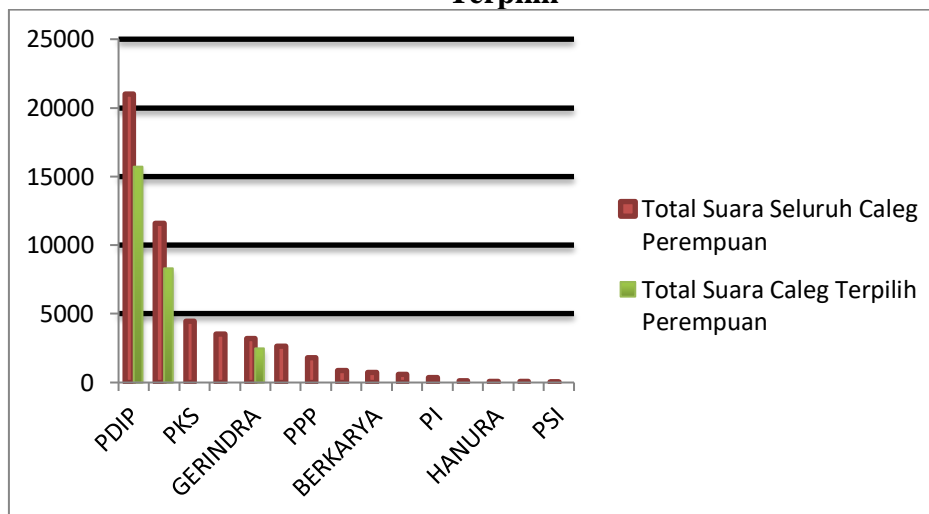


caleg caleg unggulan yang berkualitas, sebagian partai mengakui bahwa rekrutmen caleg perempuan hanya semata mata untuk memenuhi kuota 30% perempuan dalam pencalegan. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan ketua harian DPD Partai Golkar, Drs. Djuwari, M.Sc yang menjelaskan bahwa sejak pemilu tahun 2014 hingga 2019 kemarin partai golongan karya sudah memenuhi persyaratan kuota

30% perempuan dalam pencalegan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemenuhan kuota 30% tersebut hanya sebagai formalitas saja karena ada beberapa caleg perempuan yang sebenarnya tidak mempunyai motivasi dan modal politik yang cukup baik namun diminta oleh partai untuk mencalonkan diri, dan menurut narasumber hal ini tidak hanya terjadi pada partai golkar saja namun juga partai-partai lainnya.

## 2) Perolehan Suara Perempuan dalam Pemilu

**Gambar 2. Perbandingan Total Suara Seluruh Caleg dan Total Suara Caleg Terpilih**



**Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo**

Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa perolehan suara caleg perempuan sangat bervariasi. Jika seluruh suara dijumlahkan kemudian dibagi dengan jumlah seluruh caleg didapatkan hasil 287 suara, nilai 287 cukup besar jika dibandingkan dengan jumlah persen kursi perempuan yang

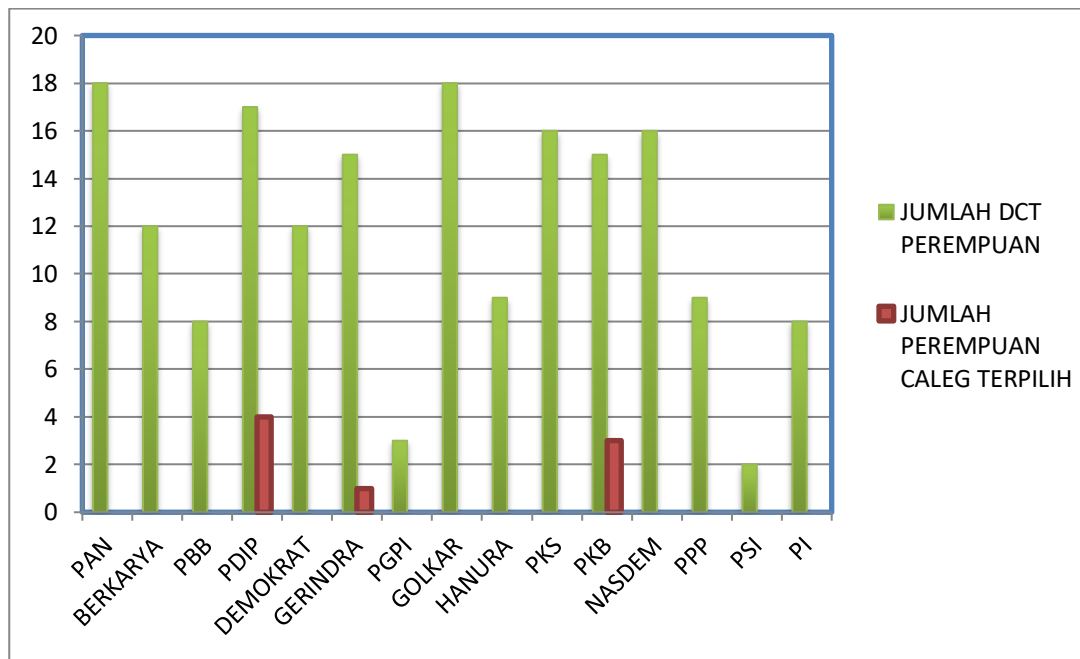
terpilih yaitu 20% dalam hal ini berarti ada kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap caleg perempuan, bahkan suara tertinggi caleg di raih oleh caleg perempuan perempuan yaitu Akhid Nuryati, seorang pertahana yang sudah terpilih dalam 3 periode berturut turut dan

menduduki jabatan Ketua DPRD Kulon Progo selama 2 Periode berturut-turut. Sebuah prestasi dan kebanggaan yang sangat luar biasa bagi kaum perempuan bisa menduduki jabatan tertinggi di DPRD Kulon Progo. Hal ini juga membuktikan bahwa adanya kesetiaan kepercayaan masyarakat terhadap politisi perempuan.

Dalam pileg 2019 kemarin, 3 besar perolehan suara caleg perempuan terbanyak di Kabupaten Kulon Progo di tempati oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yaitu sebanyak 21033 suara, Partai Kebangkitan Bangsa yaitu sebanyak 11572 suara, dan Partai Keadilan Sejahtera yaitu sebanyak 4483 suara.

### 3) Perolehan Kursi Perempuan

**Gambar 3. Grafik Perbandingan DCT Caleg Perempuan dan Caleg Perempuan Terpilih**



**Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo**

Grafik tersebut menunjukkan bahwa setiap partai mampu memenuhi kuota sebesar 30% saat pencalegan namun dari total 178 DCT perempuan hanya ada 8 perempuan yang mendapatkan kursi, 8 perempuan tersebut terdiri atas 3

partai yakni PDIP (4 orang), PKB (3 orang) dan Gerindra (1 orang). Dari grafik diatas juga dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya ada 4% perempuan terpilih yang mewakili total seluruh DCT perempuan yang terdaftar.

#### A. Faktor Yang Mempengaruhi Keterpilihan Perempuan Dalam Pileg 2019-2024 Di Kabupaten Kulon Progo

##### 1) Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan salah satu faktor utama keterpilihan seorang caleg. Sejalan dengan pendapat Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo yang juga merupakan caleg petahana perempuan terpilih, Akhid Nuryati yang mengatakan bahwa seelalu ada do'a restu keluarga dibalik kesuksesan seseorang (wawancara dilakukan di kantor DPRD, 15 November 2019). Hal ini juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan ibu Retno salah satu caleg tidak terpilih dari partai Golkar yang mengatakan bahwa status perwakinan *single parent* menjadi salah satu alasan ketidakterpilihannya dalam pemilu 2019 di Kabupaten Kulon Progo, dengan statusnya tersebut beliau mengatakn bahwa terlalu banyak hal yang harus ditangani dan dipikirkan sendiri (wawancaradengan Retno Budi Utami caleg tidak terpilih dari partai Golkar, 9 November 2019).

## 2) **Kecakapan Bersosialisasi**

Kecakapan bersosialisasi merupakan salah satu faktor utama keterpilihan perempuan. Menurut Akhid Kemampuan intelektual seseorang dapat dilihat dari cara ia berbicara, bersosialisasi, mengemukakan visi misi secara komunkatif dan transparan memalui

pendekatan-pendekatan yang edukatif. seseorang perempuan pada umumnya akan lebih serik melakukan interaksi sosial dibandingkan dengan laki-laki, interaksi sosial dengan masyarakat tersebutlah yang kemudian membuka peluang untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat (wawancara dengan Akhid Nuryati caleg petahana perempuan terpilih yang dilakukan di Kantor DPRD Kulon Progo, 15 November 2019).

## 3) **Dukungan Partai Politik**

“Partai merupakan kendaraan bagi parta politik” (wawancara dengan Djuwardi, Ketua Harian DPD Golkar Kulon Progo yang dilakukan di kantor DPD Golkar Kabupaten Kulon Progo, 5 November 2019). Partai adalah kendaraan sementara penemudinya adalah caleg itu sendiri, sehingga untuk bisa sampai pada tujuannya pengemudi itu sendiri yang harus menentukan jalan mana yang harus ia tempuh. Setiap partai selalu memberikan dukunganya kepada caleg tanpa terkecuali. Namun perlu disadari setiap caleg mempunyai modal yang berbeda antara satu dengan yang lain, setiap caleg juga mempunyai strategi yang berbeda untk sampai pada tujuan utamanya untuk memenangkan kursi. Hal

inilah yang kemudian menjadi penentu keterpilihan seorang caleg.

#### 4) **Solidaritas Tim Sukses**

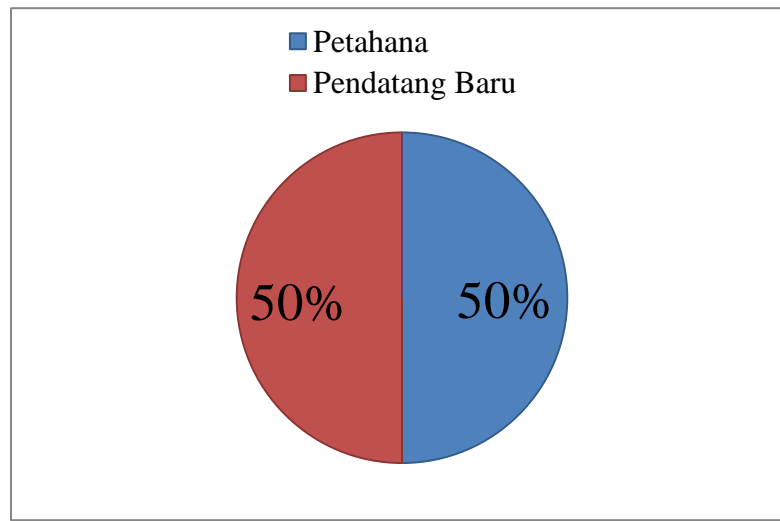
Keterpilihan seorang caleg tidak terlepas dari dukungan orang-orang dibekanganya khususnya tim sukses masing-masing caleg. Hal ini diperkuat oleh pernyataan caleg perempuan terpilih dari partai PDIP yang mengatakan bahwa strateginya dalam memperkuat tim sukses membawanya pada kemenangan (Wawancara dengan Ida Ristanti, S.H., selaku caleg perempuan terpilih, 2 Oktober 2019), selain itu pernyataan serupa juga disampaikan oleh Akhid Nuryati, caleg terpilih dari PDIP yang mengatakan bahwa selama 3 periode keterpilihannya, tidak lepas dari solidaritas tim suksesnya, bahkan beberapa diantara rela bergabung menjadi relawan tim pemenangnya untuknya tanpa imbalan apapun (wawancara dilakukan di kantor DPRD Kabupaten Kulon Progo, 15 November 2019). Dari beberapa pendapat diatas

dapat disimpulkan bahwa kekompakan dan solidaritas yang tinggi oleh masing-masing tim sukses menghantarkan caleg pada kursi kemenangan.

#### 5) **Persaingan Dengan Incumbent**

Dari pernyataan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa wajar saja ketika pendatang baru khususnya merasa tersaingi dengan caleg incumbent/ petahana, baik itu caleg petahana perempuan maupun laki-laki dikarenakan caleg perempuan pendatang baru harus bersaing dengan caleg perempuan petahana dan caleg laki laki petahana yang pada umumnya memiliki basis masa/ pendukungnya lebih banyak dengan caleg pendatang baru. Untuk bersaing dengan sesama caleg perempuan sendiri saja caleg perempuan pendatang baru hanya memiliki sedikit peluang kemenangan apalagi jika ditambah dengan persaingan dengan caleg laki-laki (wawancaradengan Retno Budi Utami selaku caleg tidak terpilih dari partai golkar, 9 November 2019).

**Gambar 4. Perbandingan Keterpilihan Caleg Petahana dan Pendaatang Baru**



**Sumber: Diolah Dari Website Resmi KPU Kulon Progo**

Berdasarkan data rekapitulasi komisi pemilihan umum kabupaten kulon progo, terdapat 8 orang caleg perempuan yang terpilih pada pileg 2019 kemarin, dari total 8 orang caleg perempuan yang terpilih, 4 caleg berasal dari PDIP, hal ini PDIP mengisi 50% kursi caleg perempuan di DPRD Kulon Progo, kemudian PKB mengisi 3 kursi atau setara dengan 37% kursi dan sisanya 1 kursi diisi oleh partai Gerindra atau setara dengan 13%. Selain itu perolehan kursi diperoleh oleh 4 orang Petahana dan 4 orang pendaatang baru yang berarti persaingan antara *incumbent* dan pendaatang baru bisa dikatakan sangat seimbang yaitu 50% 50%. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun beberapa pendapat

narasumber pada wawancara mengatakan bahwa petahana merupakan faktor penghambat keterpilihan pendaatang baru namun tidak menutup peluang bagi keterpilihan pendaatang baru karena adanya motivasi dan semangat bersaing oleh masing-masing caleg yang begitu besar melalui berbagai macam strategi yang mereka gunakan.

#### **6) Minimnya Pendidikan Politik**

Dari pernyataan narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap caleg mempunyai bekal pendidikan politik yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain, ada caleg yang memang sudah memiliki bekal politik yang matang, mengerti azas-asas berpolitik yang baik, namun

juga ada caleg yang hanya ingin mencalonkan diri karena haus akan jabatan dll. Bekal pendidikan inilah yang kemudian menjadi pendukung dan penghambat keterpilihan caleg dalam pemilu. Kepercayaan masyarakat merupakan modal utama yang harus dimiliki oleh seorang wakil rakyat baik itu caleg perempuan maupun caleg laki laki, karena ketika rakyat menjatuhkan pilihannya kepada seorang caleg hal itu berarti bahwa rakyat memastikan caleg tersebut mampu merealisasikan aspirasinya lewat kebijakan dan program yang berkualitas, terkhusus untuk caleg perempuan haruslah bisa menghadirkan program dan kebijakan yang ramah gender dengan memperhatikan hak-hak perempuan.

#### **7) Sistem Pemilu Proporsional Terbuka**

Sistem pemilu proporsional terbuka menjamin dan memastikan bahwa suara rakyat menjadi satu-satunya penentu keterpilihan caleg di parlemen, yang artinya dengan adanya sistem pemilu proporsional menyebabkan setiap caleg berlomba lomba mendapatkan suara tertinggi dengan menghalalkan bermacam-macam strategi. Berbeda dengan sistem pemilu tertutup yang

memberikan hak kepada partai untuk menentukan caleg terpilih karena rakyat hanya memilih partai (wawancara dengan Djuwardi, Ketua Harian DPD Golkar Kulon Progo yang dilakukan di kantor DPD Golkar Kabupaten Kulon Progo, 5 November 2019)

Menurutnya juga selain tidak ramah pendatang baru sistem proporsional terbuka juga mengakibatkan maraknya money politik. Terlebih lagi ikalangan masyarakat miskin yang belum begitu melek terhadap politik, mereka akan lebih muda terbuai dengan caleg-caleg khususnya caleg perempuan yang memiliki modal finansial yang cukup baik. Menurut djuwardi sistem proporsional terbuka bisa membuka peluang kepada caleg yang memiliki modal finansial lebih banyak ketimbang modal intelektual yang kemudian kualitas keuangannya lebih baik dibandingkan dengan kualitas sdm caleg itu sendiri.

#### **8) Keterbatasan Biaya Kampanye dan Sosialisasi**

Dari beberapa pendapat narasumber dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan intelektual yang baik, kecakapan bersosialisasi yang bagus, ketanggapan dan keperdulian terhadap masyarakat yang baik juga tidak cukup jika tidak dibumbui pembiayaan

kampanye dan sosialisasi yang baik pula. Beberapa caleg tidak ragu untuk mengeluarkan biaya kampanye yang tinggi guna mendapatkan simpati dan dukungan masyarakat namun caleg lainya merasa ragu untuk mengeluarkan biaya kampanye karena tidak siap dengan kekalahan.

**9) Keterbatasan Waktu Kampanye dan Sosialisasi**

Menurut pendapat caleg perempuan tidak terpilih, waktu kampanye merupakan moment yang harus dimanfaatkan sebaiknya bagi caleg khususnya caleg perempuan yang kesibukannya harus terbagi diberbagai macam bidang, mengurus rumah tangga dan pekerjaan lainnya. Namun menurut Mulyono

Ketua DPD Nasdem keterbatasan waktu kampanye dan sosialisasi memang menjadi hambatan keterpilhan caleg perempuan namun sebenarnya hambatan ini bisa diminimalisir dengan kekuatan tim sukses masing masing caleg. Menurutnya juga kekompakan dan kecerdikan caleg beserta tim suksesnya dalam menentukan strategi kampanye dan sosialisasi dengan memanfaatkan ketersediaan waktu yang ada dapat menjamin keterpilihan seorang caleg. Dari pernyataannya tersebut dapat disimpulkan bahwa keterbatasan waktu menjadi hambatan yang cukup berpengaruh apalagi jika tidak didukung oleh solidaritas tim sukses yang baik.

**Tabel 4. Faktor Yang Mempengaruhi Keterwakilan Perempuan**

No	Faktor Yang Mempengaruhi	Partai PDIP	Partai Golkar	Partai Nasdem
1	Dukungan Keluarga	Pendukung	Pendukung	Pendukung
2	Kecakapan Bersosialisasi	Pendukung	Pendukung	Pendukung
3	Dukungan Partai Politik	Pendukung	Pendukung	Pendukung
4	Solidaritas Tim Sukses	Pendukung	Pendukung	Pendukung
5	Persaingan Dengan Incumbent	Penghambat	Penghambat	Peghambat
6	Minimnya Pendidikan Politik Yang Minim	Penghambat	Penghambat	Peghambat
7	Sistem Pemilu Proporsional Terbuka	Penghambat	Penghambat	Peghambat
8	Keterbatasan Biaya Kampanye dan	Penghambat	Penghambat	Peghambat

	Sosialisasi			
9	Keterbatasan Waktu Kampanye dan Sosialisasi	Penghambat	Penghambat	Peghambat

Dari faktor faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber dilapangan terdapat 4 faktor

**B. Faktor Yang Mempengaruhi Kenaikan Jumlah Caleg Perempuan Terpilih Dalam Pemilu Legislatif 2019-2024**

Menurut Data KPU Kabupaten Kulon Progo jumlah perolehan kuris perempuan pada pemilu legislatif Tahun 2019 ialah sebanyak 8 kursi, sementara itu jumlah perolehan kursi perempuan pada pemilu legislatif pada Tahun 2014 ialah sebanyak 7 orang. Hal ini berarti ada kenaikan jumlah perolehan kursi perempuan sebanyak 1 kursi atau setara dengan 2,5% dengan jumlah kursi yang diperebutkan sama seperti tahun sebelumnya yaitu 40 kursi

Tidak hanya dari partai PDIP caleg perempuan terpilih juga berasal dari Partai Gerindra (1 Orang) dan Partai PKB (3 Orang). Kenaikan jumlah perolehan kursi perempuan dikabupaten Kulon Progo khusnya dominasi PDIP yang mengisi 4 kursi dari total 8 kursi perempuan tidak dapat dielakan dari pengaruh keterpilihan Presiden RI. Ir. Jokowi yang berasal dari PDIP selain itu juga Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo juga berasal dari PDIP(wawancara dengan Djuwardi, Ketua Harian DPD

pendukung keterpilihan perempuan dan 5 faktor penghambat keterwakilan perempuan sebagaimana yang dimuat dalam tabel diatas.

Golkar Kulon Progo yang dilakukan di kantor DPD Golkar Kabupaten Kulon Progo, 5 November 2019), hal ini menunjukkan bahwa eksistensi partai PDIP memang sedang naik daun.

Kenaikan jumlah perolehan kursi perempuan khususnya partai PDIP terjadi karena tingginya komitmen partai untuk menggerakkan potensi-potensi yang ada pada perempuan sehingga menghasilkan caleg-caleg perempuan yang berkualitas dan bisa diterima oleh masyarakat (wawancara dengan Drs. Sudarto selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kulon Progo, 4 November 2019) Menurut peneliti kenaikan jumlah perolehan kursi perempuan pada pileg 2019 tidak lepas dari terpilihnya Akhid Nuryati sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo selama dua periode berturut-turut. Keterpilihan perempuan menjadi orang nomor satu dikursi DPRD tentu saja meningkatkan motivasi kepada kaum perempuan untuk ikut terjun kedalam dunia perpolitikan khususnya dilevel kabupaten.Motivasi inilah yang kemudian melahirkan kader-



kader perempuan terbaik yang berpeluang terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo.

Dari beberapa pendapat narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan jumlah perolehan kursi perempuan dalam pileg 2019 terjadi karena adanya komitmen partai untuk meningkatkan partisipasi perempuan yang dilatarbelakangi oleh adanya dukungan pemerintah untuk memenuhi kuota sebesar 30% yang direalisasikan melalui peraturan perundangan-undangan. Selain itu apabila dilihat dari partai yang didalamnya terdapat caleg perempuan terpilih yaitu PDIP, Gerindra dan PKB, tidak dapat dipungkiri bahwa ketiga partai ini merupakan partai besar yang mempunyai pondasi yang kokoh yang tentu saja mempunyai basis massa yang tidak perlu diragukan lagi.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, antara lain :

1. Keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di kabupaten kulon progo dapat dilihat dari 3 aspek yaitu
  - a. Keterwakilan perempuan pada saat pencalegan  
Pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten kulon progo terdapat sebanyak 178 orang calon anggota legislative perempuan yang terdiri

dari 15 partai politik peserta pemilu. semua partai politik tersebut juga telah memenuhi kuota 30% perempuan saat pencalegan sesuai dengan amanat pasal 65 ayat 1 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- b. Perolehan suara perempuan dalam pemilu legislatif 2019  
Setiap partai politik peserta pemilu memang secara jelas telah memenuhi kuota 30% namun bila dilihat dari jumlah perolehan suara caleg perempuan sangat bervariasi. 3 besar perolehan suara tertinggi ditempati oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia sebanyak 21033 suara, Partai Kebangkitan Bangsa sebanyak 11572 suara, dan Partai Keadilan Sejahtera yaitu sebanyak 4483 suara.
- c. Perolehan kursi perempuan saat pemilu legislatif 2019  
Pada pemilu legislatif tahun 2019 di kabupaten kulon progo terdapat sebanyak 8 orang caleg perempuan yang terpilih. 8 orang tersebut

- terdiri atas 4 orang petahana dan 4 orang pendatang baru, hal ini menunjukkan bahwa persaingan antara caleg petahana dan caleg pendatang baru begitu kompetitif hingga memperoleh kursi yangimbang
2. Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi keterwakilan perempuan dalam pemilu 2019 di kabupaten kulon progo yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat.
    - a. Faktor pendukung meliputi dukungan keluarga, kecakapan bersosialisasi, dukungan partai politik, solidaritas tim sukses.
    - b. Faktor penghambat meliputi persaingan dengan *incumbent*, minimnya pendidikan politik, sistem pemilu proporsional terbuka, keterbatasan biaya kampanye dan sosialisasi, keterbatasan waktu kampanye dan sosialisasi
  3. Ada 2 faktor yang menyebabkan kenaikan jumlah caleg perempuan terpilih dalam pemilu legislatif tahun 2019 di Kabupaten Kulon Progo yaitu
    - a. Adanya komitmen partai politik yang tinggi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan diparlemen sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Motivasi perempuan yang begitu besar dengan terpilihnya perempuan menduduki kursi nomor 1 di DPRD kabupaten kulon progo yang menyebabkan terjadinya kenaikan signifikan khususnya dari partai PDIP juga tidak terlepas keterpilihan Presiden Republik Indonesia Ir. Jokowi dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo dari PDIP.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Rasyidin, Aruni, f. (2016). *Gender Dan Politik; Ketetwakilan Perempuan Dalam Politik*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Qodir, Z. (2016). *Teori teori dan Praktik Politik di Indonesia Memahami Partai, Pemilu dan Kejahatan Politik Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pamungkas, S. (2011) *Partai Politik teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute For Democracy and Walfarism.
- Patawari, P. (2019). *Konsep Negara Hukum dan keterwakilan rakyat (perbandingan sistem parlemen beberapa negara) - patawari*.

<https://doi.org/10.31219/osf.io/tk7ew>

## ARTIKEL JURNAL

Ardiansa, D. (2015). 'Menghadirkan Kepentingan Perempuan dalam Representasi Politik di Indonesia'. Dikutip dari <https://www.puskapol.ui.ac.id/opini/menghadirkan-kepentingan-perempuan-dalam-representasi-politik-di-indonesia.html> (26 September 2019).

Bhakti, I.A. (2016) Keterlibatan Politik Perempuan Sebagai Anggota Legislatif Dari Partai Hanura Di Dprd Kabupaten Tulungagung. Dikutip dari <https://bit.ly/2n6Zx4g> (10 September 2019).

Djou, A, Quantitarti, L (2018). 'Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak'. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun. Dikutip dari <https://bit.ly/2nbWWV> (25 Agustus 2019)

Nengsi, S.A. (2019). 'Kuota Perempuan dalam Politik: Representasi atau Partisipasi?'. Dikutip dari <https://news.detik.com/kolom/d-4368136/kuota-perempuan-dalam-politik-representasi-atau-partisipasi> (26 September 2019).

Nurcahyo, A. (2016). 'Relevansi Budaya Patriarki Dengan Partisipasi Politik dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen'. *Jurnal Agastya* Volume 6 Nomor 1. Dikutip dari <https://bit.ly/2HmzFss> Agustus 2019).

Malik. (2016). 'Analisis Peran Perempuan Dalam Partai Politik di Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPC PDIP) Kota Cirebon'. *Journal of Politic and Government Studies* volume 5 Nomor 4. Dikutip dari <https://bit.ly/340qVRK> (25 Agustus 2019).

Sutrisno, S. (2016). Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2014. *Jurnal As-Salam*, Volume 1 Nomor 2, 105-117. Dikutip dari <http://jurnal-assalam.org/index.php/JAS/article/view/63> (22 Agustus 2019)

## PROSIDING

Djou, A, Quantitarti, L (2018). 'Partisipasi Perempuan Dalam Partai Politik dan Pemilu Serempak'. Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 4 Nomor 3 Tahun. Dikutip dari <https://bit.ly/2nbWWV> (25 Agustus 2019).

## **WEBSITE**

Website Resmi KPU Republik  
Indonesia. 2019. <https://www.kpu.go.id>

Website Resmi KPU Daerah  
Istimewa Yogyakarta.2019  
[.https://diy.kpu.go.id/](https://diy.kpu.go.id/)

Website Resmi KPU Kulon progo.  
2019. <http://kab-kulonprogo.kpu.go.id/>